

**TINJAUAN HUKUM ISLAM
TERHADAP PENGAMBILALIHAN TANAH WAKAF OLEH
AHLI WARIS NAZIR DI MI AL-HIKMAH DESA BUDURAN
KECAMATAN BUDURAN KABUPATEN SIDOARJO**

SKRIPSI

Oleh :

**MUHAMMAD FARHAN
NIM : C01206027**



**Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah
Jurusan Ahwalus Syakhsiyah**

**SURABAYA
2013**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini saya:

Nama : Muhammad Farhan
NIM : C01206027
Fakultas/Jurusan : Syari'ah / Ahwalus Syakhsiyah
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengambilalihan Tanah Wakaf Oleh Ahli Waris Nazir Di MI Al-Hikmah Desa Buduran Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo.

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 10 Januari 2013

Saya yang menyatakan,



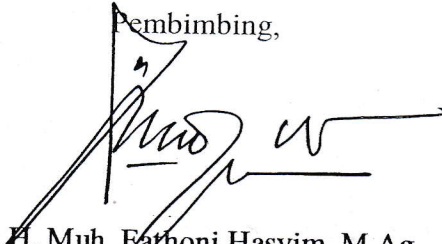
Muhammad Farhan
NIM C01206027

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Farhan, ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 18 Januari 2013

Pembimbing,



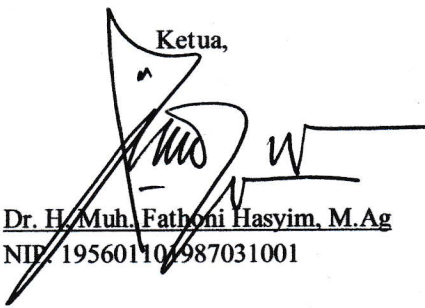
Dr. H. Muh. Fathoni Hasyim, M.Ag.
NIP. 195601101987031001

PENGESAHAN

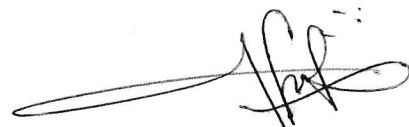
Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Farhan ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel pada hari Selasa, 30 Januari 2013, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi :

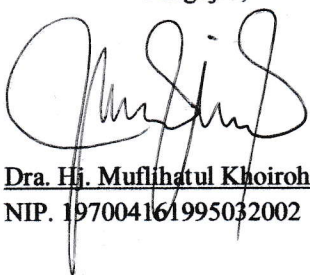
Ketua,


Dr. H. Muh. Fathoni Hasyim, M.Ag
NIP. 195601101987031001


Sekretaris,


Ahmad Fathan Aniq, MA
NIP. 198401072009011006

Penguji I,


Dra. Hj. Muflihatul Khoiroh, M.Ag
NIP. 197004161995032002

Penguji II,


Drs. H. Abd. Rouf, M.Pd.I
NIP. 195301061982031003

Pembimbing,


Dr. H. Muh. Fathoni Hasyim, M.Ag
NIP. 195601101987031001

Surabaya, 20 Pebruari 2013

Mengesahkan,
Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Dr. H. Sahid HM, M.Ag
NIP. 196803091996031002

PERNYATAAN KESEDIAAN PUBILKASI

Yang bertanda tangan dibawah ini saya:


Nama : Muhammad Farhan
NIM : C01206027
Fakultas/Jurusan : Syari'ah / Ahwalus Syakhsiyah
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengambilalihan
Tanah Wakaf Oleh Ahli Waris Nazir Di MI Al-
Hikmah Desa Buduran Kecamatan Buduran
Kabupaten Sidoarjo.

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bersedia untuk di publikasikan

Surabaya, 10 Januari 2013

Saya yang menyatakan,




Muhammad Farhan
NIM C01206027

ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil dari penelitian lapangan (*Field research*). Skripsi ini bertujuan untuk menjawab dua pertanyaan penelitian sebagai berikut: *Pertama*, Apa faktor yang melatarbelakangi pengambilalihan tanah wakaf oleh ahli waris nazir? *Kedua*, Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pengambilalihan tanah wakaf di Madrasah Ibtidaiyah al-Hikmah oleh ahli waris nazir?

Data penelitian ini keseluruhanya diperoleh dan dihimpun melalui wawancara, dokumen dan bahan kepustakaan, kemudian dianalisis dengan menggunakan metode diskriptif analisis.

Hasil penelitian ini menyimpulkan beberapa temuan : *Pertama*, Bahwasanya faktor yang melatarbelakangi pengambilalihan tanah wakaf dikarenakan, rendahnya ekonomi sebagian ahli waris nazir, ahli waris tidak mempunyai rumah, tanah yang diambilalih tidak mempunyai sertifikat resmi, lemahnya kontrol masyarakat, tindakan ahli waris karena posisinya sebagai pengurus yayasan dan mempunyai otoritas tertinggi terhadap pengembangan MI al-Hikmah. *Kedua*, Tindakan pengambilalihan tanah wakaf yang dilakukan oleh ahli waris nazir merupakan tindakan yang tidak dibenarkan menurut hukum Islam baik ditinjau dari segi hibah, wakaf, maupun dari segi moral dan akhlak.

Sejalan dengan temuan di atas, kepada yayasan dan ahli waris dalam menyikapi tentang masalah pengambilalihan tanah tersebut disarankan *Pertama*, agar sadar akan hukum baik hukum Islam maupun hukum positif serta mematuhi prosedur yang ditetapkan agama dan pemerintah, untuk menciptakan kesejahteraan umat. *Kedua*, dalam perselisihan harta wakaf, maka yang berhak menyelesaikan adalah Pengadilan Agama. Hal ini sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam tentang penyelesaian benda wakaf pada Pasal 266, agar peristiwa seperti ini tidak terjadi lagi di tempat lain dan waktu yang akan datang. Maka sangat penting sekali sosialisasi mengenai sertifikasi tanah wakaf guna menambah wawasan semua pihak.

Menyadari betapa pentingnya masalah pertanahan di Indonesia, maka Pemerintah bersama DPR RI menetapkan undang-undang tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) yaitu UU No. 5 tahun 1960 yang disahkan tanggal 24 September 1960. Dalam konsiderannya pada bagian berpendapat, huruf “a” disebutkan

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam pasal 14 ayat (1) huruf “b” UUPA menentukan bahwa pemerintah Indonesia dalam rangka sosialisme Indonesia, membuat suatu rencana umum mengenai persediaan, peruntukan dan penggunaan bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Dalam peruntukan seperti dimaksud di atas, termasuklah untuk keperluan-keperluan suci lainnya, sesuai dengan dasar Ketuhanan Yang Maha Esa.³

Secara lebih khusus, keperluan yang termasuk kepentingan agama (peribadatan) ini disebut dalam pasal 29 ayat (3) UUPA yang menegaskan bahwa perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur dengan peraturan pemerintah, sedangkan ayat (1) sebelumnya menyatakan: “Hak milik badan-badan keagamaan dan sosial, diakui dan dilindungi. Badan-badan tersebut dijamin pula akan memperoleh tanah yang cukup untuk bangunan dan usahanya dalam bidang keagamaan dan sosial”.⁴ Sebagai realisasi dan ketentuan ini, kemudian dikeluarkan Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 1977.⁵

³ *Ibid.*, 7-8.

⁴ *Ibid.*, 18

⁵ Dalam konsiderannya disebutkan bahwa wakaf adalah suatu lembaga keagamaan yang dapat dipergunakan sebagai salah satu sarana guna pengembangan kehidupan keagamaan, dalam rangka mencapai kesejahteraan spiritual dan material menuju masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Lihat Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet. IV, 2000), 487.

8 فيه

Selain itu terdapat hadis yang secara tersirat dapat dikaitkan dengan wakaf,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ

⁸ Hajjāj, Al-, Imam Abi Al Husain Muslim bin, *Sahih Muslim Juz II*, 70

[illegible]

Dalam pasal 22 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf telah jelas disebutkan bahwa dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf harta benda wakaf hanya dapat diperuntukan bagi:

- Selain itu pada pasal 40 UU No 41 Tahun 2004 disebutkan bahwa, harta benda wakaf yang sudah diwakafkan dilarang:

- Berdasarkan ketentuan perundangan tersebut, segala praktek mengenai perwakafan yang terjadi di masyarakat, baik mengenai peruntukan maupun yang

¹⁶*Ibid.*, 21

Di MI al-Hikmah Buduran Sidoarjo pada sekitar tahun 2001 muncul kasus pengambilalihan tanah wakaf oleh Ahli waris Nazir, di mana Ahli waris Nazir mengubah fungsi tanah wakaf dari ketentuan asal yang telah ditetapkan di ikrar wakaf, dari yang awalnya tanah wakaf diperuntukkan untuk kepentingan pendidikan dan peribadatan berubah menjadi tanah wakaf untuk keperluan umum

Dalam aturan hukum Islam disebutkan bahwasannya harta benda yang telah diwakafkan tidak boleh diubah / ditukar, dijual, dihibahkan maupun diwariskan, selain itu dalam perundang-undangan yang berlaku di Indonesia juga menyebutkan bahwa harta benda wakaf hanya boleh ditujukan untuk kepentingan peribadatan dan sosial kemasyarakatan (kepentingan umum). Oleh karena itu penulis ingin memaparkan lebih jauh tentang bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap permasalahan yang terjadi di MI Al-Hikmah Buduran Sidoarjo.

Dari pemaparan latar belakang di atas, masalah yang akan dibahas dapat diidentifikasi, melalui pengembangan dari identifikasi masalah tersebut akan

Dari hal ini penulis akan menyebutkan beberapa identifikasi masalah sebagai berikut :

- ### C. Batasan Masalah

D. Rumusan Masalah

1. Apa saja faktor-faktor yang melatarbelakangi pengambilalihan tanah wakaf oleh ahli waris nazir di MI al-Hikmah Buduran Sidoarjo ?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap pengambilalihan tanah wakaf oleh ahli waris nazir di MI al-Hikmah Buduran Sidoarjo?

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka pada penelitian ini, pada dasarnya untuk mendapatkan deskripsi masalah yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang mungkin pernah dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya sehingga, diharapkan tidak terjadi pengulangan materi penelitian.

Sejauh penelitian penulis terhadap karya-karya ilmiah yang berupa pembahasan mengenai pengambilalihan tanah wakaf, memang bukan yang pertama kali dilakukan. Tema yang dibahas pada skripsi kali ini secara global sudah pernah dikaji dalam skripsi sebelumnya, seperti skripsi yang dibahas oleh Anas Syamsuddin Muzakki yang berjudul “Penguasaan Ahli waris Terhadap pengelolaan Tanah Wakaf Masjid Dalam Prespektif Hukum Islam Dan UU No. 41 Tahun 2004 (Studi Kasus Desa Sambiroto Kec Sooko Kab Mojokerto)”.¹⁷

Kedua, skripsi yang dibahas oleh Nurul Qamariah dengan NIM: C31304010 yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang no. 41 tahun 2004 terhadap perubahan peruntukan tanah wakaf mushalla menjadi pendopo makam Mbah H. Ali Mas’ud Sidoarjo” yang memfokuskan tentang praktek perubahan penggunaan tanah wakaf masjid untuk pendopo makam serta menganalisis faktor-faktor dan juga pertimbangan sampai terjadi perubahan peruntukan.¹⁸ Perubahan peruntukan tanah wakaf dari mushalla menjadi pendopo makam H. Ali Mas’ud dikarenakan semakin banyaknya para peziarah di makam H. Ali Mas’ud sehingga

¹⁷Anas Syamsuddin Muzakki, *Penguasaan Ahli Waris Terhadap pengelolaan Tanah Wakaf Masjid Dalam Prespektif Hukum Islam Dan UU No. 41 Tahun 2004 (Studi kasus Desa Sambiroto Kec Sooko Kab Mojokerto)*, Tahun 2008

¹⁸ Nurul Qamariah, lulusan IAIN Sunan Ampel Surabaya Fakultas Syariah Jurusan AS tahun 2008 dengan judul skripsi *Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Terhadap Perubahan Peruntukan Tanah Wakaf MuşOllā Menjadi Pendopo Makam Mbah H. Ali Mas'ud Sidoarjo*

5. Terdapat fakta adanya penjualan sebagian tanah wakaf oleh ahli waris nazir.

F. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui alasan apa yang melatar belakangi munculnya pengambilalihan sengketa tanah wakaf di MI al-Hikmah Buduran Sidoarjo

1. Untuk mengetahui faktor dan kronologi pengambilalihan tanah wakaf di MI al-Hikmah Buduran Sidoarjo yang dilakukan oleh ahli waris nazir.
2. Untuk mengetahui bagaimana perspektif hukum Islam terhadap pengambilalihan tanah wakaf di MI al-Hikmah Buduran Sidoarjo yang dilakukan oleh ahli waris nazir.

G. Kegunaan Hasil Penelitian

1. Dari segi teoritis hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk pengembangan dan kepentingan ilmiah dalam studi perwakafan khususnya yang berkaitan dengan penyalahgunaan dan pengambilalihan obyek wakaf berupa tanah.
2. Dari segi praktis diharapkan bermanfaat sebagai bahan pertimbangan untuk menyelesaikan masalah penyalahgunaan dan pengambilalihan tanah wakaf di masyarakat.

H. Definisi Operasional

Agar lebih mudah memahami pembahasan dalam skripsi ini perlu adanya pencantuman Definisi Operasional, diantaranya adalah:

- ## 1. Hukum Islam

Hukum yang bersifat umum (*kulli*) yang dapat diterapkan dalam perkembangan Hukum Islam menurut kondisi, situasi masyarakat dan masa.²⁰ Dalam hal ini Hukum

²⁰ Hasby Ash-Shiddiqy, *Falsafah Hukum Islam*, Jakarta, 44

Sistematika pembahasan dalam skripsi ini disusun menjadi lima bab, dengan perincian sebagai berikut:

- [illegible]

PERWAKAFAN MENURUT HUKUM ISLAM DAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004

1. Pengertian Wakaf

Para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan wakaf, diantaranya *pertama* Hanafiyah mengartikan wakaf sebagai menahan benda milik wakif dan menyedekahkan atau mewakafkan manfaatnya kepada siapapun yang diinginkan dengan tujuan kebajikan, maka dari itu harta wakaf tetap menjadi milik si wakif sehingga ia boleh menariknya kembali, dikarenakan menurutnya hukum wakaf ialah *jaiz* (boleh), tidak wajib seperti pinjam meminjam,² Abu Hanifah

² Suparman Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, h. 25

⁶ Maqdisiyy, Al-, Muwaffaq Al-Din Ibn Qudamah, Muḥammad Ḥasan Ismā‘il (ed), *Al-Muqni‘*, h. 227

melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.¹⁰

d. Q.S. 22(al-Hajj): 77

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (٧٧)

Hai orang-orang yang beriman, ruku'lah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan.

e. HR. Muslim r.a

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ

ثَلَاثَةٌ إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ ¹¹

“Dari Abi Hurairah: Bahwasannya Rasulullah saw bersabda: apabila seseorang meninggal dunia maka terputuslah segala amalannya kecuali tiga perkara: yakni sadaqah jāriyah, ilmu yang bermanfaat dan doa anak yang sholeh”

Ulama menafsirkan *ṣadaqah jāriyah* sebagai wakaf dan ada juga yang mengartikannya dengan *al-habs* (harta yang pokoknya dikelola dan hasilnya didermakan). Shadaqah jariyah dalam Hadits di atas direalisasikan dalam bentuk wakaf yang pahalanya mengalir terus menerus kepada si wakif. Seperti yang tersebut dalam kitab *Kifāyatul Akhyār* karangan *Imam Taqiyuddīn Abī Bakar Ibn Muhammad Al-Khusayniy* dan *Fathul Muʿīn* karangan *Syaikh Zainuddīn bin ʿAbdul ʿAzīz Al-Mulaybarīy*:

¹⁰*ibid*, h. 67

¹¹ Hajjāj, Al-, Imam Abi Al Husain Muslim bin, *Sahih Muslim Juz II*, h.70

menganggapnya sebagai harta miliknya sendiri (tidak sewenang-wenang menggunakannya seperti miliknya sendiri).¹⁴

3. Rukun dan Syarat Wakaf

a. Orang yang berwakaf (wakif)

Wakif adalah orang yang mewakafkan hartanya. Wakif disyaratkan bagi orang mukallaf, yang ahli berbuat kebaikan, memiliki *Mawqūf*, dan dalam pelaksanaannya tidak ada paksaan yakni dengan syarat orang tersebut berakal sehat, baligh dan tidak lalai/ boros (karena harta orang boros dibawah kuasa walinya),¹⁵ telah dapat mempertimbangkan baik buruknya tindakan yang dilakukan, merdeka atau jika wakif seorang budak maka ia harus mendapat izin dari majikannya terlebih dahulu, dikarenakan wakaf merupakan pengguguran hak milik seseorang dengan memberikan hak tersebut kepada orang lain, sedangkan hamba sahaya tidak mempunyai hak milik.¹⁶

b. Benda yang diwakafkan (*Mawqūf*)

Benda yang diwakafkan merupakan benda yang jelas, memiliki nilai guna dan tidak rusak atau habis ketika diambil manfaatnya (tahan lama), milik orang yang berwakaf, ada ketika diwakafkan, bisa dipindah tangankan dari milik

¹⁴ Munzirīy, Al-, Al-Hāfiẓ Zaki Al-Din ‘Abd Al-‘Azīm, *Ringkasan Ṣaḥīḥ Muslim*, Diterjemahkan oleh Syinqithi Djamaluddin dan Moh. Mochtar Zoerni, h. 539

¹⁵ Kirdiy, Al-, Muhammad Amin, *Tanwīrul Qulūb*, h. 256

¹⁶ A. Faishal Haq, *Hukum Wakaf dan Perwakafan di Indonesia*, h. 17-18

seseorang ke milik orang lain.¹⁷ Selain itu barang yang diwakafkan apabila didasarkan pada wasiat maka besarnya wakaf tidak boleh lebih dari sepertiga harta yang ditinggalkan.

Ketentuan besarnya wakaf yang didasarkan atas wasiat didasarkan pada hadits Nabi saw:

حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ قَالَ أَخْبَرَنِي عَامِرُ بْنُ سَعْدٍ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ عَنْ أَبِيهِ
قَالَ مَرِضْتُ بِمَكَّةَ مَرَضًا فَأَشْفَيْتُ مِنْهُ عَلَى الْمَوْتِ فَأَتَانِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُنِي فَقُلْتُ
يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي مَالًا كَثِيرًا وَلَيْسَ يَرِثُنِي إِلَّا ابْنَتِي أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثِي مَالِي قَالَ لَا قَالَ قُلْتُ فَالشَّطْرُ
قَالَ لَا قُلْتُ الثُّلُثُ قَالَ الثُّلُثُ كَبِيرٌ إِنَّكَ إِنْ تَرَكْتَ وَلَدَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَشْرِكُهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّمُونَ

18 النَّاسَ

Dari Sa'ad Bin Abi Waqash ra bahwa ia bertanya, wahai Rasulullah, saya seorang yang mempunyai harta benda, sedang warisku hanya seorang anak perempuan, maka bolehkah saya sedekahkan dua pertiga harta benda saya tersebut? Nabi saw menjawab: “jangan” saya bertanya: “bolehkah saya sedekahkan separohnya?” Nabi menjawab: “jangan” sayapun bertanya kembali: “bolehkah saya sedekahkan sepertiganya?” Jawab Nabi saw: “sepertiga itu sudah cukup banyak, sesungguhnya jika engkau tinggalkan warismu menjadi orang yang berkecukupan itu lebih baik dari pada engkau tinggalkan menjadi orang-orang miskin yang meminta-minta kepada orang lain”.¹⁹

¹⁷ Gazāliy, Al-, Muhammad bin Muhammad Abī Hāmid, *Al-Wajīz*, h. 199

¹⁸ Sanady, As-, Abi Hasan Nuruddin Muhammad bin 'Abdul Hadi, *Sahih Bukhari Juz 2*, h. 232

¹⁹ Kamal dkk, *Fiqh.....*, h.192

Nadzir boleh melakukan apapun atas harta benda wakaf, asalkan mendatangkan kemanfaatan dan kebaikan untuk wakaf yang dikelolanya. Selain itu tindakan yang dilakukan tidak menghilangkan zat dari benda wakaf itu sendiri maupun mengalihkan kepemilikan atas harta benda wakaf tersebut. Nadzir tidak bertanggung jawab atas kerusakan yang timbul atas harta wakaf, kecuali diketahui dengan sebenar-benarnya bahwa kerusakan itu memang disebabkan oleh kelalaian atau kesengajaan nadzir.²⁷

²⁷ Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, h. 92

Lafaz atau *sigat* ialah segala ucapan, tulisan maupun isyarat dari seseorang yang berakad untuk menyatakan kehendak dan menjelaskan apa yang diinginkannya. Wakaf harus diucapkan dengan jelas tentang benda wakaf, penerima dan untuk apa benda tersebut diwakafkan.²⁹

- 1) Harus *munjazah* (terjadi seketika), hal ini menunjukkan terlaksananya wakaf seketika setelah sighat ijab diucapkan atau ditulis.
- 2) Tidak diikuti syarat *batil* (palsu), maksudnya ialah syarat yang merusak dasar wakaf atau meniadakan hukumnya, yakni keabadian
- 3) Tidak mengandung pengertian untuk mencabut kembali wakaf yang sudah dilakukan.³⁰

²⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh.....*, h. 414

²⁹ Sa‘id Hawwā, *Al-‘Ibādāt.....*, 2474

[illegible]

dari *mauquf ‘alaih*. Wakif hanya boleh melakukan sighat ijab dengan isyarat apabila memang tidak mampu melakukan dengan lisan dan tulisan.³¹

Dasar atau dalil diperlukannya *sigat dalam* wakaf ialah karena wakaf adalah melepaskan hak milik, benda dan mafaat ataupun manfaat saja kepada orang/pihak lain. Maksud dan tujuan melepaskan hak milik adalah urusan hati, sedangkan tidak ada seorangpun yang mengetahui maksud hati seseorang, oleh karenanya dengan pernyataanlah bisa diketahui maksud dan tujuan seseorang yang sesungguhnya.³²

Lafaz şigat ada dua macam, yaitu:

- 1) *Lafaz* yang jelas (ṣāriḥ): وَقَفْتُ وَحَبَسْتُ وَ سَبَلْتُ

Lafaz yang tersebut di atas tidak mengandung makna lain selain wakaf, maka jika lafaz ini ucapkan ketika melakukan ikrar wakaf langsung dihukumi sah.

- 2) Lafadz kiasan (kinaya): تَصَدَّقْتُ وَحَرَمْتُ وَأَبَدْتُ

Lafadz yang tersebut di atas mengandung makna ganda (belum jelas). Maka dari itu lafadz-lafadz tersebut haruslah diiringi dengan niat wakaf secara tegas.³³

³¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h. 244

³²Proyek Peningkatan Zakat dan Wakaf Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Fiqh*, h. 54

³³Hasan Ayyūb, *Fiqh Al-Mu‘āmalāt Al-Māliyyah Fil Islamiy*, h. 291-292

4. Kedudukan Harta Benda Wakaf

1. Hanafiyah: kedudukan harta benda wakaf masih tertahan atau terhenti ditangan wakif itu sendiri, dalam arti harta yang telah diwakafkan masih menjadi milik si wakif, jika yang diwakafkan hanya manfaat dari harta tersebut, bukan aset dari harta itu sendiri
2. Malikiyah: harta wakaf hanya diberikan kepada yang berhak dan kedudukan harta benda wakaf tetap menjadi milik si wakif jika jangka waktu wakaf telah habis sesuai dengan yang telah ditentukan sebelumnya³⁴
3. Syafi'iyah: kedudukan harta benda wakaf sudah bukan menjadi milik si wakif akan tetapi menjadi milik Allah sehingga tidak diperbolehkan melakukan perubahan atas HBW (Harta Benda Wakaf)
4. Hanabilah: seperti pendapat golongan syafi'iyah yang menganggap bahwa harta benda wakaf terlepas dari milik si wakif dan menjadi milik Allah atau milik umum. Wewenang mutlak wakif seketika itu terlepas dari wakif, sehingga ia tidak dapat menarik kembali wakaf atau mengalihkan hak milik.³⁵

³⁵ Hasan Ayyūb, *Fiqh.....*, h. 307

Maka dari itu golongan Syafi'iyah dan hanabilah mendefinisikan wakaf sebagai suatu pemberian dengan menahan zat benda atas dasar milik Allah dan kepemilikan wakif putus saat itu, sedangkan pemanfaatannya diberikan kepada masyarakat secara umum.³⁶

34

b. Wakaf Khairi

Wakaf khairi atau bisa disebut sebagai wakaf umum ialah suatu bentuk wakaf yang diikrarkan oleh wakif untuk tujuan kemaslahatan masyarakat pada umumnya. Pada mulanya wakaf khairi ada yang berstatus wakaf ahli. Banyak pendapat yang menyatakan bahwa untuk wakaf khairi dalam pengucapan ikrar wakaf disyaratkan ada nadzir yang akan mengelola tanah wakaf tersebut. Jika wakif tidak sanggup memilih, maka hakim akan menunjuknya.⁴⁰

Wakaf jenis ini merupakan wakaf yang paling sesuai dengan ajaran Islam, dikarenakan jelas manfaatnya lebih dapat dirasakan oleh masyarakat secara umum, selain itu juga merupakan sarana penyelenggaraan kesejahteraan masyarakat baik dalam bidang keagamaan, ekonomi, sosial, budaya dan pendidikan. Seperti yang diwujudkan dalam bentuk bangunan sekolah, rumah sakit, rumah yatim piatu, asrama dan pondok pesantren.⁴¹

³⁹ Haq, *Hukum Wakaf dan.....*, h. 4-5

⁴⁰ Praja, *Perwakafan di Indonesia*, h. 30-31

⁴¹ Ali, *Sistem Ekonomi Islam*, h. 91

لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ (٨)

Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan Berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang Berlaku adil. (Al-Mumtahanah:8)⁴³

Pada prinsipnya diantara wakaf ahli dan wakaf khairi tidak terdapat perbedaan keduanya bertujuan untuk membantu pihak-pihak yang membutuhkan sebagai wujud pelaksanaan terhadap perintah Allah untuk membelanjakan sebagian harta di jalan-Nya. Perbedaan diantara keduanya terletak pada pemanfaatannya. Wakaf ahli pemanfaatannya hanya terbatas pada keluarga wakif, yakni anak-anak mereka dan keturunannya sampai semua anggota keluarga meninggal semua, kemudian setelah itu baru dimanfaatkan untuk orang lain, baik anak-anak yatim, orang miskin, janda dan selainnya. Sedangkan wakaf khairi dari awal memang diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat secara

⁴³ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Quran dan*, h. 550

Dua pendapat diatas sangatlah berbeda satu dengan yang lain. Dalam madzhab Syafi'i perubahan status, penukaran benda dan tujuan wakaf memiliki peraturan yang ketat, namun demikian berdasarkan kebutuhan mendesak dan prinsip maslahat dikalangan para ahli hukum (fiqh) Islam madzhab lain perubahan atas harta benda wakaf itu dapat dilakukan. Hal ini disandarkan pada pandangan agar manfaat wakaf itu tetap berlangsung terus menerus sebagai *sadaqah jariyah*, tidak *mubaẓir* lagi karena rusak dan lain sebagainya.⁴⁶

Hal ini berbeda dengan pendapat yang dikemukakan oleh Ulama Hanafiyah, dimana ia membagi menjadi tiga macam:

- a. Apabila si wakif pada saat mewakafkan mensyaratkan bahwa dirinya dan nadzir berhak untuk menukar, maka penukaran wakaf itu boleh dilakukan.

⁴⁵ Adidjani Al-Abij, *Perwakafan Tanah di Indonesia.*, h. 42-43

⁴⁶ Usman, *Hukum Perwakafan*, h. 39

1. Pengertian Wakaf

Adapun wakaf menurut KHI dan Undang-Undang wakaf hampir sama yaitu perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya untuk kepentingan ibadat atau keperluan umum lainnya sesuai ajaran islam atau syari'at.⁴⁸

⁴⁷ Muhammad Abid Abdullah Al Kabisi, *Hukum Wakaf Kajian Kontemporer Pertama dan Terlengkap tentang Fungsi dan Pengelolaan Wakaf Serta Penyelesaian Atas Sengketa Wakaf*, h. 351-360

⁴⁸ WIPRESS, *Kompilasi Hukum Islam*, h. 232

2. Dasar Hukum Undang-Undang No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

- a. Undang-Undang RI No 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional yang dibentuk berdasarkan ketetapan MPR No IV/MPR/1999 tentang GBHN tahun 1999-2004 yang menetapkan arah kebijakan pembangunan hukum yang antara lain melakukan penataan sistem hukum nasional yang menyeluruh dengan mengakui dan menghargai hukum agama dan hukum adat.
- b. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, pasal 14 (1) huruf b, pasal 5 dan pasal 49.
- c. Peraturan Pemerintah nomor 28 tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik.⁴⁹

Selain itu yang dijadikan dasar hukum wakaf oleh Pemerintah Indonesia ialah Peraturan Menteri Agama No. 1 Tahun 1978 yang mengatur tentang tata cara perwakafan tanah milik, Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berisi perintah kepada Menteri Agama RI dalam rangka penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan yang menyinggung sedikit tentang wakaf (pasal 15 (3): dalam hal kekayaan yayasan yang berasal dari wakaf, kata “wakaf” dapat ditambahkan setelah kata “yayasan”), SK Dir. BI No. 32/34/KEP/DIR Tentang

⁴⁹ Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bibingan Masyarakat Islam Departemen Agama, *Proses Lahirnya Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*, h. 20-21

a. Wakif;

Dalam Undang-Undang wakaf telah jelas tertulis bahwa yang dimaksud dengan wakif adalah pihak (orang/badan hukum) yang mewakafkan harta benda miliknya. “Wakif dalam sistem perwakafan di Indonesia meliputi: 1) wakif perseorangan, 2) Organisasi, 3) Badan Hukum” (pasal 7).⁵¹

Wakif perseorangan hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi persyaratan: dewasa; berakal sehat; tidak terhalang melakukan perbuatan hukum; dan merupakan pemilik sah harta benda wakaf. Wakif organisasi hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan organisasi untuk mewakafkan harta benda wakaf milik organisasi sesuai dengan anggaran dasar organisasi yang bersangkutan. Sedangkan Wakif badan hukum hanya dapat melakukan wakaf

⁵⁰ Proyek Peningkatan Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI, *Fiqh Wakaf*, h. 24-30

⁵¹ Departemen Agama Kantor Wilayah Provinsi Jawa Timur, *Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanannya*, h. 6

dan *kedua* organisasi yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam (pasal 10 (2)).⁵⁶

Badan hukum sebagaimana dimaksud hanya dapat menjadi nadzir apabila memenuhi persyaratan: *pertama* pengurus badan hukum yang bersangkutan memenuhi persyaratan nadzir perseorangan sebagaimana dimaksud pada syarat-syarat sebelumnya; *kedua*, dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan *ketiga*, bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam (pasal 10 (3)).⁵⁷

Nadzir yang dimaksudkan sebelumnya harus didaftarkan pada Menteri dan BWI melalui Kantor Urusan Agama setempat, apabila tidak ada maka didaftarkan di KUA terdekat, Kantor Departemen Agama atau perwakilan BWI di Kota/Kabupaten/Provinsi dan kemudian BWI menerbitkan tanda bukti pendaftaran Nadzir. Salah seorang Nadzir perseorangan harus berdomisili di tempat/lokasi benda wakaf berada, seperti yang tersebut dalam pasal 4, 7 dan 11 PP No 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan wakaf.⁵⁸

c. Harta Benda Wakaf:

⁵⁶ *ibid*, h. 8-9

⁵⁷ *ibid*, h. 9

⁵⁸ *ibid*, h. 66-73

Tersebut dalam UU No 41 Tahun 2004 tentang wakaf bahwa “Harta benda wakaf hanya dapat diwakafkan apabila dimiliki dan dikuasai oleh wakif secara sah” (pasal 15).⁵⁹

Harta benda wakaf terdiri dari benda bergerak dan tidak bergerak. Benda bergerak adalah harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, seperti: uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak sewa dan benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syari'ah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (pasal 16 (1 dan 3)).⁶⁰

Benda tidak bergerak meliputi (pasal 16 (2)):

- hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah terdaftar maupun yang belum terdaftar
- bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah
- tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah;
- hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang.undangan yang berlaku;
- benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang.undangan yang berlaku.⁶¹

⁵⁹ *ibid*, h. 11

⁶⁰ *ibid.*

⁶¹ *ibid.*

d. Ikrar Wakaf;

“Ikrar wakaf dilakukan oleh Wakif kepada Nadzir di hadapan PPAIW dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, dinyatakan secara lisan atau tulisan serta dituangkan dalam akta ikrar wakaf oleh PPAIW” (pasal 17).⁶²

Ketika Wakif tidak dapat menyatakan ikrar wakaf secara lisan atau tidak dapat hadir dalam pelaksanaan ikrar wakaf karena alasan tertentu yang dibenarkan oleh hukum, Wakif dapat menunjuk sendiri kuasanya dengan surat kuasa yang diperkuat oleh 2 (dua) orang saksi (dewasa, beragama islam, berakal sehat, tidak terhalang melakukan perbuatan hukum) (pasal 18).⁶³

Untuk dapat melaksanakan ikrar wakaf, wakif atau kuasanya menyerahkan surat dan/atau bukti kepemilikan atas harta benda wakaf kepada PPAIW (pasal 19).⁶⁴

Ikrar wakaf dituangkan dalam akta ikrar wakaf yang minimal memuat: *pertama*, nama dan identitas Wakif; *kedua*, nama dan identitas Nadzir; *ketiga*, data dan keterangan harta benda wakaf; *keempat*, peruntukan harta benda wakaf; *kelima*, jangka waktu wakaf (pasal 21).⁶⁵

⁶² *ibid*, h. 13

⁶³ *ibid.*

⁶⁴ *ibid*, h. 13-14

⁶⁵ *ibid*, h. 14

e. Peruntukan harta benda wakaf;

Dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf harta benda wakaf hanya dapat diperuntukan bagi:

- 1) sarana dan kegiatan ibadah
- 2) sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan
- 3) bantuan kepada fakir miskin anak terlantar, yatim piatu, bea siswa
- 4) kemajuan dan peningkatan ekonomi umat, dan/atau
- 5) kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan (pasal 22).⁶⁶

Penetapan peruntukan harta benda wakaf dilakukan oleh Wakif pada pelaksanaan ikrar wakaf . Dan ketika wakif tidak menetapkan peruntukan harta benda wakaf, Nadzir dapat menetapkan peruntukan harta benda wakaf yang dilakukan sesuai dengan tujuan dan fungsi wakaf (pasal 23).⁶⁷

f. Jangka waktu wakaf.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 (pasal 18) sebagai penjelasan atas UU No 41 Tahun 2004 disebutkan bahwa harta benda wakaf yang berupa tanah hanya dapat diwakafkan untuk jangka waktu selama-lamanya (tanpa batas) kecuali wakaf yang berupa hak atas tanah seperti hak milik atas tanah, hak guna bangunan, hak guna usaha, hak pakai di atas tanah milik Negara,

⁶⁶ *ibid.* h. 15

⁶⁷ *ibid*, h.15-16

hak milik atas satuan rumah susun, hak guna bangunan atau hak pakai di atas hak pengelolaan.⁶⁸

4. Kedudukan Harta Benda Wakaf

Kedudukan harta benda wakaf yang berupa tanah menurut Peraturan Pemerintah no 42 tahun 2006 pasal 18 sebagai penjelasan atas UU no 41 tahun 2004 adalah bukan lagi menjadi milik si wakif, dikarenakan apabila harta benda wakaf yang diwakafkan berupa tanah, maka tidak diperbolehkan dibatasi oleh waktu, melainkan selama-lamanya. Hal itu berbeda dengan wakaf hak atas tanah seperti hak guna bangunan, hak guna usaha, hak pakai di atas tanah Negara dan seperti yang telah tersebut dalam pasal 17 PP No. 42 Tahun 2006.

5. Pengelolaan Wakaf Ahli dan Khairi

Dalam peraturan Undang-Undang no 41 tahun 2004 tidak terdapat pembedaan pengelolaan antara wakaf ahli dan khairi, hanya saja perlu adanya kejelasan dalam pernyataan kehendak wakif dalam Majelis Ikrar wakaf, apakah wakaf tersebut ditujukan kepada masyarakat secara umum ataukah hanya khusus kepada kerabat dekat berdasarkan hubungan nasab dengan wakif.

Hal ini mengindikasikan bahwa pengaturan mengenai wakaf berlaku untuk wakaf khairi maupun wakaf ahli. Peruntukan wakaf untuk *Mauquf ‘Alaih* tidak dimaksudkan untuk pemanfaatan pribadi, melainkan untuk kesejahteraan umum, baik sesama kerabat secara turun temurun atau masyarakat secara umum.

⁶⁸ *ibid*, h.79

6. Perubahan Status dan Peruntukan Tanah Wakaf

Dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf dalam pasal 22 UU No 41 Tahun 2004 tentang wakaf menjelaskan perihal peruntukan harta benda wakaf.

Harta benda wakaf hanya dapat diperuntukkan bagi:

1. Sarana dan kegiatan ibadah
2. Sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan
3. Bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, bea siswa
4. Kemajuan dan peningkatan ekonomi umat
5. Kemajuan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syari'ah dan peraturan perundang-undangan.⁶⁹

Harta benda yang telah diwakafkan tidak sama dengan yang belum diwakafkan. Harta benda yang telah diwakafkan tidak dapat lagi untuk dijadikan jaminan, dihibahkan, dijual, diwariskan, disita, ditukar, ataupun dialihkan dalam bentuk yang lainnya.

Dalam hal harta benda wakaf ditukar atau diubah peruntukannya, maka nadzir melalui PPAIW harus mendaftarkan kembali kepada instansi yang berwenang dan BWI (Badan Wakaf Indonesia) sesuai ketentuan yang berlaku

⁶⁹ *ibid*, h. 15

Pada dasarnya Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 dan PP No. 42 Tahun 2006 tidak berbeda jauh dengan PP No. 28 Tahun 1977 dalam hal larangan dilakukannya perubahan peruntukan atau penggunaan tanah wakaf, terkecuali dalam keadaan khusus dimana aturan memperbolehkannya, seperti yang telah tersebut di atas.

[illegible]

- ⁷¹ *ibid*, h. 106

TINJAUAN HISTORIS KASUS PENGAMBILALIHAN TANAH WAKAF OLEH AHLI WARIS NAZIR

1. Sejarah singkat berdirinya MI Al-Hikmah Buduran Sidoarjo

Melihat perkembangan yang begitu meyakinkan, maka pada tahun pelajaran 1993/1994 MI al-Hikmah statusnya menjadi terdaftar, kemudian pada tahun Pelajaran 1999/2000 statusnya berubah menjadi diakui, dan pada saat ini tahun pelajaran 2010/2011 statusnya sudah berubah menjadi terakreditasi A (disamakan).¹

Madrasah Al-Hikmah Buduran Sidoarjo berada 100 m dari Jalan raya Surabaya Malang dan terletak ditengah-tengah desa. Letaknya yang strategis karena

[illegible]

3. Visi dan Misi MI al-Hikmah Buduran Sidoarjo

Terwujudnya lembaga pendidikan yang mencetak insan berwawasan keimanan, ketaqwaan, dan akhlak mulia serta cerdas, cakap, trampil, dan inovatif menuju sebuah prestasi

Untuk mewujudkan visi madrasah, MI Al-Hikmah memiliki beberapa indikator capaian untuk mengukur keberhasilan, di antaranya:

1. Unggul dalam akhlakul karimah
2. Unggul dalam kompetisi melanjutkan di jenjang pendidikan yang lebih tinggi
3. Unggul dalam IPTEK (Ilmu pengetahuan dan teknologi)
4. Unggul dalam perolehan prestasi akademik
5. Unggul dalam lomba olahraga/seni
6. Unggul dalam lomba UKS, dan Pramuka
7. Memiliki lingkungan yang nyaman dan kondusif untuk belajar

[illegible]

11	Shofwatin Nuroniyah	Guru Bidang Studi	Guru
12	Imam Hanafi	Guru Bidang Studi	Guru
13	Syaifuddin	Guru Bidang Studi	Guru
14	Istiqomah	Guru Bidang Studi	Guru
15	Zainab	Guru Bidang Studi	Guru

Tabel II

Keadaan Siswa MI al-Hikmah Buduran Tahun Pelajaran 2012 / 2013

No.	Kelas	L	P	Jumlah
1	1	28	18	46
2	2	25	13	38
3	3	22	29	56
4	4	23	21	44
5	5	22	23	45
6	6	23	21	44
Jumlah				268

Tabel III

Sarana Dan Prasarana

No.	Nama Barang	Keadaan	Jumlah
1	Gedung Kelas	Baik	6
2	Gedung Kantor / Guru	Baik	1
3	Gedung Kepala Sekolah	Baik	1
4	Gedung Perpustakaan	Baik	1
5	Ruang Komputer	Baik	1
6	Gedung Musholla	Baik	1
7	Kamar Mandi	Baik	6
8	Ruang UKS	Baik	1
9	Kantin	Baik	1

Sumber : dokumentasi MI Al-Hikmah Buduran Sidoarjo Tahun Ajaran 2012 – 2013

f. Kebijakan Madrasah Ibtidaiyah Al-Hikmah dalam bidang organisasi sekolah :

- a. Madrasah Ibtidaiyah Al-Hikmah merupakan organisasi yang berada di bawah naungan pengurus organisasi sekolah.
- b. Dalam segi edukatif Madrasah Ibtidaiyah Al-Hikmah bernaung di bawah Lembaga Pendidikan Ma'arif.

c. Dalam bidang ketenagaan pendidik mengikuti kebijakan Departemen Agama.⁶

Organisasi-organisasi yang mendukung kelancaran aktifitas sekolah sebagai berikut:

- Pengurus yayasan
- Komite sekolah
- Organisasi alumni

B. Tinjauan Historis Pengambilalihan Tanah Wakaf oleh Ahli Waris Nazir

1. Proses pemberian tanah yang dilakukan oleh Wakif dan pengambilalihan tanah sengketa.

KH. Farhan Bahri adalah seorang tokoh masyarakat (Kyai panutan masyarakat) yang berada di Desa Buduran, beliau dikaruniai 7 putra HK (70), UT (50), HH (44), AAW (42), AK (40), SA (39), AM (37). Pada Tahun 1973 beliau menerima amanah dari salah seorang pengusaha desa Buduran yakni Bapak Maksoem, berupa Sebidang Tanah wakaf, luas tanah tersebut 580 m, yang sedianya digunakan untuk kepentingan dan pembangunan Madrasah Ibtidaiyah Al-Hikmah desa buduran.⁷

Kemudian pada tahun 1980 Tim pembangunan Madrasah Ibtidaiyah mengadakan pembangunan gedung kedua yang terletak di sebelah Utara Rumah *al-*

⁶ Dokumen Administrasi MI al-Hikmah Buduran.

⁷ Hasil interview dengan Bapak Ruchu sahid, beliau adalah pengurus Bidang wakaf dan pertanahan NU Sidoarjo, pada tanggal 20 Pebruari 2012

mauquf lahu, dengan memperoleh izin *al-mauquf lahu* dan keluarga. Pembangunan gedung kedua ini dimaksudkan sebagai solusi bertambah banyaknya murid, sementara Madrasah Ibtidaiyah Al-Hikmah masih kekurangan gedung sebagai sarana dan prasarana belajar mengajar

Peristiwa Sengketa antara ahli waris Wakif M (60), MU (50), L (49) C (40), dan Ahli Waris nazir ini terjadi setelah salah satu dari ahli waris nazir AAH (42) menjual sebidang tanah wakaf kepada orang lain, di MI Al-Hikmah Buduran Sidoarjo pada sekitar tahun 2001 muncul kasus pengambilalihan tanah wakaf oleh Ahli Waris Nazir, dimana Ahli Waris Nazir mengubah fungsi tanah wakaf dari ketentuan asal yang telah ditetapkannya di piagam wakaf, dari yang awalnya tanah wakaf diperuntukkan untuk kepentingan pendidikan dan peribadatan berubah menjadi tanah wakaf untuk keperluan umum

C. Faktor penyebab pengambilalihan tanah Madrasah Ibtidaiyah *Al-hikmah*.

Adapun yang menjadi faktor penyebab pengambilalihan tanah wakaf Madrasah Ibtidaiyah *Al-hikmah* adalah sebagai berikut :

- ⁸ Hasil interview dengan tim pembangunan Madrasah Ibtida'iyah al-Hikmah , Desa Buduran, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo,. Sumber data ini tidak diperoleh secara langsung dari ahli waris tetapi dari paman ahli waris bapak Bushro Sidik yang pernah membicarakan tentang perkara pengambilalihan tanah sengketa dengan ahli waris pengambilalih. Hal ini dilakukan demi untuk menjaga *privasi* keluarga dan demi menjaga keberlangsungan dan kelancaran pelaksanaan penelitian penulis. Pada Tanggal 26 Agustus 2012

⁹ Hasil interview dengan masyarakat Dusun Buduran Salah satunya bpk. 'Ali Mahfud, selaku tetangga nadzir dan pandangan masyarakat lain.

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENGAMBILALIHAN TANAH
WAKAF OLEH AHLI WARIS *NAZIR* DI DESA BUDURAN KECAMATAN
BUDURAN KABUPATEN SIDOARJO

Hukum Islam senantiasa memberikan perlindungan kepada umat Islam, sebagaimana *maqasid al-shari'ah* (tujuan disyariatkan hukum Islam) yang di antaranya adalah memelihara agama (*hifz al-dīn*), memelihara jiwa (*hifzh al-nafs*), memelihara akal (*hifzh al-aql*), memelihara keturunan (*hifzh al-nasl*), memelihara harta (*hifzh al-mal*).¹

Wakaf dihukumi sah menurut aturan Islam, apabila telah terpenuhi rukun dan syaratnya.

[illegible]

2. *Mauqūf*: merupakan benda yang memiliki nilai guna, tahan lama, milik orang yang berwakaf, ada ketika diwakafkan, bukan barang yang haram atau najis, bukan barang yang dapat menimbulkan fitnah, jelas ukurannya.

[illegible]

Bahwa *mauquf ‘alaih* sudah ditunjukkan secara jelas, hal itu terbukti dengan adanya nadzir dalam hal ini adalah H. Farhan Bahri (50 tahun) yang beralamat di desa Buduran Sidoarjo, dan adanya tujuan wakaf yang mengarah pada unsur pendekatan diri kepada Allah, yakni difungsikan untuk keperluan peribadatan dan pendidikan.

4. *Ṣighat*: merupakan ucapan, tulisan atau isyarat yang didalamnya harus mengindikasikan secara jelas mengenai benda, penerima atau untuk apa benda itu diwakafkan. Selain itu harus terjadi seketika, tidak diikuti syarat palsu dan tidak mengandung pengertian untuk mencabut kembali wakaf yang sudah dilakukan.

Bahwa sahnya sighth dapat dibuktikan dengan adanya piagam tanah wakaf, dimana didalamnya sudah jelas tertulis tentang benda wakaf, penerima maupun tujuan dari benda itu diwakafkan.

Adanya benda atau harta yang diwakafkan (*mā'uquf*) dalam perwakafan ini mauqufnya adalah tanah yang berada di desa Buduran yaitu 29X 20 M tanah ini

Adanya tujuan *wakaf* yang disertai wakaf dalam perwakafan (*nāzir*) dan pemberian *wakif* sudah disaksikan oleh masyarakat setempat yaitu Moeslim kepala desa, Samsuddin Perangkat desa Juga K.H Farhan Bahri sebagai kepala madrasah juga bertindak sebagai Nadzir, adanya pernyataan *wākif* sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan harta bendanya melalui ungkapan beliau yaitu “Gaween tanah iki kanggo madrasah ” berawal dari ungkapan tersebut kata-kata kanggo madrasah hal ini sesuai dengan shighat kinayah yaitu *Ta’abbatdu* serta dalam kaidah arti pokok amr ialah menunjukkan wajib. bahwa ungkapan yang di perintahkan oleh orang yang lebih tinggi tingkatannya kepada orang yang lebih rendah tingkatannya yang berarti wajib untuk dilakukan oleh orang yang mendengarkannya. Juga adanya niat dari si *wākif* yang dengan tulus sudah mewakafkan dan memberikan manfaatnya untuk kepentingan umat/kemaslahatan umat.

Sejalan dengan kedudukannya, maka harta wakaf terlepas dari hak milik si wakif, dan tidak pula pindah menjadi milik orang lain maupun badan-badan yang yang diserahi tugas untuk mengelola wakaf. Harta wakaf terlepas dari hak milik wakif sejak wakaf diikrarkan dan menjadi milik Allah yang pemanfaatannya

إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا

Umar mengartikan ungkapan ”menahan dzat dari benda” dengan tidak bolehnya menjual, menghibahkan, dan mewariskan harta benda wakaf, sedang manfaat benda itu diberikan kepada fakir miskin, sanak kerabat, hamba sahaya, sabilillah, tamu dan pelancong/musafir.

[illegible]

62

Pesoalannya apakah diperbolehkan diadakan perubahan, penukaran maupun penjualan demi menjaga keberlangsungan manfaat harta benda wakaf?

Para ulama berbeda pendapat dalam menanggapi masalah perubahan peruntukan harta benda wakaf. Diantaranya Syafi'i dan Malik yang menyatakan bahwa benda wakaf yang sudah tidak berfungsi (tidak dapat dipergunakan atau kurang berfungsi), maka benda tersebut tidak boleh dijual, diganti/ditukar, dipindahkan, akan tetapi harta benda wakaf tersebut dibiarkan dalam keadaannya. Pendapat tersebut didasarkan pada hadits Nabi yang dibawa oleh Ibnu Umar dimana disebutkan bahwa benda wakaf tersebut tidak boleh dijual, dihibahkan atau diwariskan.

Dalam madzhab Ahmad bin Hanbal, jika suatu benda wakaf sudah tidak dapat lagi difungsikan sebagaimana mestinya, maka wakaf tersebut harus dijual dan uangnya dipergunakan untuk mengganti benda wakaf tersebut, sehingga wakaf tetap bisa berlanjut dan tetap bisa dimanfaatkan.

Dari pendapat-pendapat Ulama diatas dapat disimpulkan bahwasannya tanah wakaf dapat diubah peruntukannya selagi harta benda wakaf sudah

tidak dapat dimanfaatkan lagi/berkurang manfaatnya sesuai dengan tujuan awal wakaf. Karena yang diutamakan dalam wakaf adalah manfaatnya, dimana dengan manfaat bisa menunjang kesejahteraan umat, sesuai dengan tujuan dan fungsi wakaf.

Adapun yang terjadi pada tanah wakaf di Desa Buduran, ahli waris nazir merubah peruntukan sebagian tanah wakaf yang awalnya ditujukan untuk kepentingan peribadatan dan pendidikan menjadi keperluan umum sebagian digunakan pribadi seperti membangun rumah salah satu anggota keluarganya, bukan disebabkan adanya kerusakan atau pun berkurangnya manfaat dari tanah wakaf, akan tetapi dikarenakan keinginan pribadi ahli waris nazir karena ada sebagian ahli waris nazir yang kondisi ekonominya lemah.

Rumah bukan suatu kepentingan yang ada hubungannya dengan tujuan wakaf yang tertulis dalam piagam tanah wakaf, yaitu pendidikan dan peribadatan, akan tetapi dalam madzhab Syafi'i tidak diperbolehkan adanya perubahan tujuan dalam wakaf. Selain itu ahli waris nazir juga sudah berjanji untuk menjual tanah wakaf tersebut.

Dalam aturan Islam, tujuan wakaf ialah digunakan untuk kepentingan umum, jika wakaf tersebut merupakan wakaf *khoiri*, dan dapat dipergunakan untuk kepentingan kerabat ahli waris nazir begitu juga anak cucunya, apabila wakaf memang merupakan wakaf *ahli*. Wakaf yang menjadi obyek penelitian

Sesungguhnya tidak ada dosa bagi orang yang mengelola harta benda wakaf untuk memakannya dengan cara baik, atau orang yang tidak ikut menanam modal boleh juga memakannya dengan cara baik. Hal ini mengindikasikan bahwa wakif pun sebenarnya diperbolehkan untuk mengambil manfaat dari harta yang telah diwakafkannya, akan tetapi dengan syarat tidak membahayakan benda wakaf itu sendiri.² Dalam kasus yang terjadi memang tidak ada perlakuan nazir yang membahayakan tanah wakaf, akan tetapi dengan apa yang dilakukan oleh sebagian ahli waris nazir mengakibatkan sebagian tanah wakaf tersebut tidak dapat lagi digunakan untuk kepentingan yang sesuai dengan ikrar wakaf, karena sebagian tanah wakaf tersebut sekarang telah berubah menjadi rumah.

[illegible]

Hal ini berbeda dengan pendapat yang dikemukakan oleh Ulama Hanafiyah, dimana ia membagi menjadi tiga macam:

- sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan dalam Hukum Islam dalam aturannya harta benda wakaf hanya boleh diubah apabila terjadi kerusakan sehingga berkurang atau tidak dapat dimanfaatkan lagi, sedangkan yang terjadi di Desa Buduran kondisi tanah wakaf dapat dimanfaatkan dan diubah menjadi rumah salah satu keluarga karena menurut keinginan pribadi ahli waris nazir.
- Hal ini berbeda dengan pendapat yang dikemukakan oleh Hanafiyah, dimana ia membagi menjadi tiga macam:
1. Apabila si wakif pada saat mewakafkan mensyaratkan bahwa di kemudian hari jika tanah wakaf itu rusak atau berkurang maka nazir berhak untuk menukar, maka penukaran wakaf itu boleh dilakukan.
 2. Apabila si wakif tidak mensyaratkan dirinya atau orang lain berhak untuk menukar, maka penukaran wakaf itu tidak boleh dilakukan.
- sedangkan suatu saat benda wakaf itu tidak bisa lagi diambil manfaatnya.

Abu Hanifah menyamakan kedudukan wakaf seperti 'Ariyah (pinjam meminjam). Hanya saja dalam 'ariyah benda ada di tangan peminjam yang menggunakan, sedangkan benda dalam wakaf ada di tangan pemilik yang tidak menggunakan dan mengambil manfaat benda itu. Dengan demikian benda yang diwakafkan tetap menjadi milik wakif sepenuhnya.

Melihat kenyataan yang demikian dapat diketahui bahwasannya perubahan peruntukan sebagian tanah wakaf yang dilakukan oleh wakif di Desa Manguharjo menurut pendapat Hanafiyah dihukumi sah. Dan lebih baiknya jika dalam setiap akad perjanjian dilakukan pencatatan untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman di kemudian hari.

[illegible]

Peristiwa Sengketa antara ahli waris Wakif M (60), MU (50), L (49) C (40), dan Ahli Waris nazir ini terjadi setelah salah satu dari ahli waris nazir AAH (42) membangun rumah dan menjual sebidang tanah wakaf kepada orang lain, di MI Al-Hikmah Buduran Sidoarjo pada sekitar tahun 2001 muncul kasus pengambilalihan tanah wakaf oleh Ahli Waris Nazir, dimana Ahli Waris Nazir mengubah fungsi tanah wakaf dari ketentuan asal yang telah ditetapkannya di piagam wakaf, dari yang awalnya tanah wakaf

[illegible]

Adapun bukti kuat yang dapat digali dan dianalisis secara hukum Islam berdasarkan penelitian penulis, bahwa tanah sengketa tersebut adalah tanah *wakaf* sebagai berikut:

- a. Berdasarkan data *interview* dengan kepala Madrasah Ibtidaiyah Al-hikmah sekarang,⁴ bahwa ketika terjadi persengketaan tanah ini ahli waris nadzir pengambilalih tanah mau menyerahkan kembali tanah tersebut dan mengakui akan perwakafan yang dilakukan ayahnya, akan tetapi ahli waris meminta ganti rugi berupa sejumlah uang untuk mengganti tempat tinggal ahli waris pengambilalih sebagaimana dijelaskan dalam bab III.

[illegible]

B. Analisis Hukum Islam terhadap Pengambilalihan Kembali Tanah Sengketa yang dilakukan oleh Ahli Waris nazir.

⁵ Hasil *interview* dengan kepala sekolah dan ketua komite Madrasah Ibtida'iyah Islamiyyah. Beliau berdua selaku alumni dan sanak dari *al-maghfur lahu*.

yakni kemaslahatan yang didukung oleh *syara'*.⁶ Dalam hal ini adalah anjuran *wakaf* yang berfungsi untuk kepentingan bersama.

Tindakan pengambilalihan tanah *wakaf* yang dilakukan oleh ahli waris juga bertentangan dengan fungsi *wakaf*, yakni untuk keadilan sosial Islam sebagai *mauqūf ‘alayh* (peruntukan *wakaf*). Hal ini diperjelas oleh Undang-undang Republik Indonesia No. 41 tahun 2004, tentang *wakaf*, dalam pasal 22. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa *Mauqūf ‘alayh* (peruntukan) *wakaf* selain sarana kegiatan ibadah, juga pendidikan, kesehatan, bantuan untuk fakir miskin, anak-anak terlantar, yatim piatu, beasiswa, kemajuan dan peningkatan umat, dan kemajuan dan kesejahteraan umum lainnya.⁷

Tindakan tersebut bertentangan dengan *maqashid al-shari'ah*, yakni *hifzh al-mal* (menjaga harta) dan *hifzh al-din* (menjaga agama) pemeliharaan tanah yang dihibahkan oleh *wakif* terletak pada tingkatan memelihara harta dalam peringkat *dharuriyat*, karena terdapat larangan mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak sah. Apabila aturan itu dilanggar, maka berakibat terancam eksistensi harta.⁸ juga *hifzh al-din* karena *wakaf* merupakan anjuran dalam Islam yang mempunyai nilai sosial dan dilakukan demi kemaslahatan dan kepentingan umat.⁹ Sebagai dampak negatif tidak diberlakukannya teori *maqasid al-shari'ah* adalah tindakan pengambilalihan tanah *wakaf* yang dilakukan oleh ahli

⁶ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2008), 424

⁷ Departemen Agama RI, *UU Wakaf No. 41 2004*, (Jakarta: Depag RI, 2004), 14. juga dapat dilihat dalam Departemen Agama RI, *Nazir Profesional dan Amanah*, (Jakarta: Depag RI, 2005), 58

⁸ H. Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 131

⁹ Ibid, 129

Ditinjau dari segi akhlak, bahwa tindakan ahli waris nadzir tersebut merupakan tindakan yang tidak bermoral dan tidak sesuai dengan status manusia adalah sebagai khalifah Allah di bumi. Khalifah lebih dari pada wakil saja. Allah memberi kebenaran dan meninggalkan pada manusia pesan untuk mengisi kebenaran di bumi. Allah tidak campur tangan secara langsung di alam semesta, tetapi kalam-Nya mungkin dapat dilaksanakan oleh manusia khilafah adalah sumpah manusia untuk melaksanakan kebaikan, untuk berlaku adil dan tidak merusak di bumi. Kalau manusia berbuat demikian, ia akan menjadi pewaris Allah, para nabi dan orang yang percaya karena mereka melaksanakan kehendak Allah di atas bumi, dan akan mewarisi tanah. Di sini khilafah berarti pergantian

dan pewarisan. Khilafah ini adalah deposit kepercayaan yang diberikan Allah kepada manusia, dan yang telah ditolak oleh semua makhluk kecuali manusia.¹⁰

Dalam surat Q.S. 2(al-Baqarah) : 30

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ

وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ¹¹

“Ingatlah ketika Tuhan-mu berfirman kepada Malaikat : “Sesungguhnya Aku akan mengangkat Adam menjadi khalifah¹² di muka bumi. Para malaikat bertanya: “Mengapa engkau hendak menempatkan di permukaan bumi orang yang akan membuat bencana dan menumpahkan darah, sedang kami senantiasa bertasbih memuji dan menyucikan-Mu?” Allah berfirman : “Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak engkau ketahui”.

Dalam al-Qur'an Q.S. 6 (al-An'am) : 165

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ

13 رَبِّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ

“Dan Dia-lah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa bumi, Dia meninggikan sebagian kamu dari sebagian yang lain beberapa tingkat. Karena Dia hendak mengujimu. Tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu cepat memberikan siksaan. Namun Dia juga Maha Pengampun dan Penyayang.”

¹⁰ Baca: Kebaktian atas tanah oleh: Hassan Hanafi, *Pandangan Agama tentang Tanah*, (Prisma, 1984), 44

¹¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an Dan Terjemahannya*, (Surabaya; AL-HIDAYAH, 2002), 6

¹² Perkataan khalifah berarti penghubung atau pemimpin yang disertai untuk menyampaikan atau memimpin sesuatu dan khalifah di sini ialah Nabi Adam. Lihat: Bachtiar Surin, *Terjemah dan*, surat al-Baqarah 2: 30

¹³ *Ibid.*, 231

Allah menciptakan manusia di muka bumi bukanlah untuk membuat kerusakan (pengganggu) kepada masyarakat sekitarnya. Karena telah jelas bahwa tindakan yang menimbulkan kerusakan hendaklah dihilangkan. Sebagaimana dalam kaidah fiqhiyah dijelaskan:

الضَّرُّ يُزَالُ

“Bahaya harus dihilangkan”¹⁵

Perbuatan hibah berupa pemberian tanah yang diperuntukkan kepada Madrasah Ibtidaiyah Al-hikmah adalah untuk menjalankan syari'at agama dan untuk mengharap pahala akhirat yang kekal. Perbuatan *wakif* bisa dikategorikan sebagai shadaqah jariyah yang nantinya akan mendapat pahala yang mengalir tiada henti-hentinya. Sebagaimana ditegaskan dalam hadis Rasulullah Saw:

¹⁵ Maimoen Zubair, *Formulasi Nalar Fiqh, jilid I*, (Surabaya: Khalista, 2006), 209

ثَلَاثَةٌ إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ¹⁶

Sebagai khalifah (pemimpin) di muka bumi, maka tidak-lah pantas apabila bertindak sesuatu yang keluar dari ajaran agama Islam yakni bertindak mengambilalih Madrasah Ibtidaiyah Al-hikmah untuk kepentingan pribadi (keluarganya sendiri) yang jelas peruntukannya, yakni untuk Madrasah Ibtidaiyah Al-hikmah sebagaimana ucapan *wakif*¹⁷ yang telah mewakafkan tanahnya untuk pembangunan Madrasah Ibtidaiyah al-hikmah sebagai tempat belajar mengajar agama Islam anak-anak dan remaja Desa Buduran dan sekitarnya sebagaimana keinginan ketika *wakif* masih hidup. Adapun tujuan didirikannya Madrasah Ibtidaiyah Al-hikmah juga merupakan motivasi yang ada dalam diri *wakif* dengan melihat beberapa sebab sebagai berikut :

- 1). Kondisi kesadaran beragama masyarakat yang masih *minus* dan perlu ditingkatkan keimanan dan ketaqwaan.

¹⁷ “*Pakailah tanah ini untuk Madrasah*”.

PENUTUP

Dari keseluruhan pembahasan yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa :

- ## B. Saran

- [illegible]

Hendaknya manusia lebih berhati-hati dalam menjaga keluarga dan hartanya dari fitnah (ujian) yang senantiasa diberikan oleh Allah kepada hambanya yang nantinya akan menjerumuskan ke dalam siksa api neraka.

- perundang-undangan yang berlaku.

druddīn Abi Muḥammad Mahmūd Bin Aḥmad, *‘Al-Bukhārī*, Beirut-Lebanon: Dār Al-Fikr, tt

labij, Perwakafan Tanah di Indonesia, Jakarta: 2002

Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih (Sebuah Pengantar) o Persada, 2006

ad Daud, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan* 1988

Abi, *I‘ānah Aṭ-Ṭālibīn*, Semarang: Toha Putera, tt

Muhammad bin Muhammad Abī Ḥāmid, *Al-Wajī* ikr, tt

Fiqh Al-Mu‘āmalāt Al-Māliyyah Fil Islamiy, K.

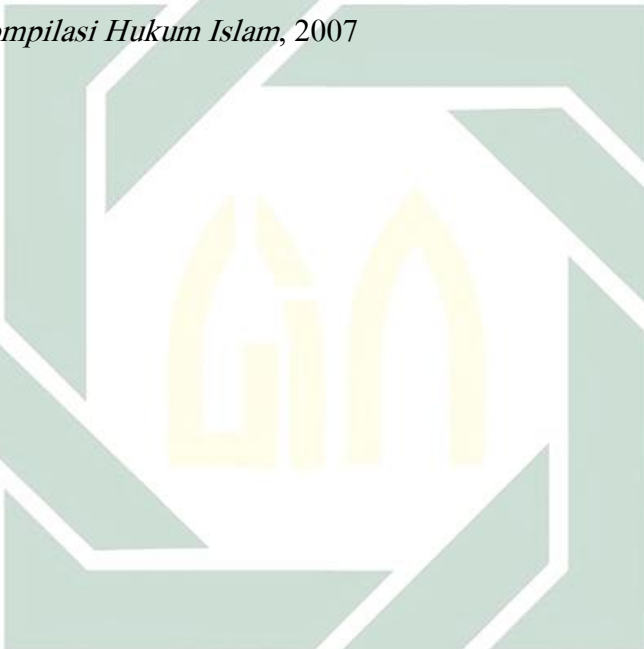
am Abi Al Husain Muslim bin, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Bei

- druddīn Abi Muḥammad Mahmūd Bin Aḥmad, *‘Al-Bukhārī*, Beirut-Lebanon: Dār Al-Fikr, tt
- labij, Perwakafan Tanah di Indonesia*, Jakarta: 2002
- Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih (Sebuah Pengantar)* o Persada, 2006
- ad Daud, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan* 1988
- Abi, *I‘ānah Aṭ-Ṭālibīn*, Semarang: Toha Putera, tt
- Muhammad bin Muhammad Abī Ḥāmid, *Al-Wajī* ikr, tt
- Fiqh Al-Mu‘āmalāt Al-Māliyyah Fil Islamiy*, K.
- am Abi Al Husain Muslim bin, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Bei

- Syafi'i, Asy-, Al Imam Abi 'Abdullah Muhammad bin Idris, *Al Bayān fī Fiqh Al Imām Asy-Syāfi'iy*, Beirut-Lebanon: Dar Al Kutub Al Ilmiah, 1983
- Yusuf, Abi Ishāq Ibrāhīm bin Ali bin, *Al-Muḥaḥib Fi Fiqh Al Imām Asy-Syāfi'iy*, Beirut Lebanon: Dār Al-Fikr, tt
- Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Jawa Timur, *Data Dasar Profil Kelurahan Manguharjo Kecamatan Manguharjo Kota Madiun*, 2010
- Departemen Agama Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 pasal 22 Tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanannya*, 2007
- Departemen Agama Kantor Wilayah Provinsi Jawa Timur, *Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanannya*, 2007
- Departemen Agama KUA Kecamatan Manguharjo Kota Madiun, *Formulir Pendataan Nadzir Perseorangan*, Madiun, 2009
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: PT. Syaamil Cipta Media, 2005
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Quran dan Terjemahannya (Revisi Terbaru)*, Semarang: CV. As Syifa', 1999
- Departemen Agama RI Kantor Urusan Agama Kecamatan Manguharjo, *Salinan Akta Ikrar Wakaf*, Madiun, 1990
- Direktorat Pemberdayaaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama, *Proses Lahirnya Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*, 2006
- Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia*, Jakarta, 2006
- Kantor Urusan Agama Kecamatan Manguharjo, *Data Tanah Wakaf Menurut Bidang Luas Dan Fungsi*, Madiun, 2010
- Machmudi Muhson pada diskusi EL-SHOHWAH, *Perkembangan Wakaf Dalam Wacana Fiqh Islam dan Pemberdayaannya Dalam Pembangunan*, <http://elshohwah.tripod.com/makalah/Diskusi%201.htm> 21 Agustus 2001


aksi, *Wakaf Dalam Islam*, <http://baitul-maal.com/artikel/wakaf-dalam-islam.html>, Selasa 2 Juni 2009

RESS, *Kompilasi Hukum Islam*, 2007




aksi, *Wakaf Dalam Islam*, <http://baitul-maal.com/artikel/wakaf-dalam-islam.html>, Selasa 2 Juni 2009

RESS, *Kompilasi Hukum Islam*, 2007



aksi, *Wakaf Dalam Islam*, <http://baitul-maal.com/artikel/wakaf-dalam-islam.html>, Selasa 2 Juni 2009

RESS, *Kompilasi Hukum Islam*, 2007



aksi, *Wakaf Dalam Islam*, <http://baitul-maal.com/artikel/wakaf-dalam-islam.html>, Selasa 2 Juni 2009

RESS, *Kompilasi Hukum Islam*, 2007

